

Kajian Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Minahasa Selatan

Riane Johnly Po

Abstract. This study aims to determine the regulations and policies relating to the activities of Small Business, small business contribution to economic growth since the autonomy to implement, and support for small business development in South Minahasa regency. This study used a survey technique, with a population of small businesses in South Minahasa regency. Sample was determined by 30 small business units in six districts with a proportional amount specified villages. While institutions in the survey who had close links with the coaching and development of small businesses. The results indicate the regulations and policies related to various economic activities, more people includes regulations related to the effort to obtain and increase local revenue. Small business enough to contribute to economic growth, particularly in moving the economy to fulfill the basic needs. Realization of government assistance for small business development is still lacking. Although the natural resources in the South Minahasa district has good potential as a driver economic capital, but if not managed wisely hard drives the local economy. Regulations relating to wider access for small business development must be accommodated and encouraged.

Keywords: Local Autonomy, Local Economy, Small Business

Ketika Indonesia mulai menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah, memungkinkan terbukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai layanan bagi kepentingan masyarakat. Salah satu bidang yang cukup mendapat perhatian di era otonomi adalah bidang ekonomi. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensi dan peluang ekonomi demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi ekonomi di Indonesia mengalami kesenjangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan, dan secara spesifik antara daerah-daerah yang ada di pulau Jawa dengan daerah-daerah di luar pulau Jawa. Karena itu, otonomi daerah telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dan *stakeholders* untuk bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi yang berbasiskan potensi lokal.

Di masa lalu daerah-daerah senantiasa harus mendengar komando pusat melalui apa yang dinamakan dengan juklak dan juknis untuk melakukan berbagai aktifitas yang berkaitan dengan wewenang dan otoritas pemerintah daerah. Daerah seperti dipasung dalam bingkai ketaatan dan kepatuhan yang mutlak tanpa perlu berpikir panjang dan berinisiatif untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan potensi daerah. Era kini merupakan kebalikan dari apa yang terjadi di masa lalu. Daerah-daerah di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menciptakan dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, semua potensi yang ada dapat terwujud nyata apabila pemerintah

Riane Johnly Pio adalah Dosen Program Studi Administrasi Bisnis Fisip Unsrat

sebagai *prime mover* mampu menciptakan kebijakan publik khususnya di bidang ekonomi yang mampu menyentuh kepentingan semua pihak di daerah.

Khusus di bidang ekonomi, pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menentukan kebijakan di bidang ekonomi harus mampu menciptakan atmosfer bisnis yang dapat menciptakan kondisi yang nyaman bagi pertumbuhan dunia usaha. Karena pertumbuhan usaha yang sehat akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara. Garelli dalam Kristamuljana (2007) menyatakan bahwa daya saing perusahaan-perusahaan ditentukan oleh hubungan antara negara, perusahaan-perusahaan dan penduduk. Dan, kondisi ini akan dapat terwujud jika stabilitas dalam berbagai bidang seperti keamanan, sosial, politik dan ekonomi berada dalam keadaan yang normatif.

Mengambil pendapat dari salah satu *founding fathers* Republik Indonesia Soekarno dalam Basri (2007) bahwa dalam konteks kesejahteraan sosial maka: (1) Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka; (2) Tidak didominasi kaum kapitalis; (3) Kesejahteraan yang merata keseluruh rakyatnya, bukan kesejahteraan orang seorang. Mengacu dari harapan dan keinginan presiden pertama Indonesia, maka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Indonesia dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan potensi usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses meningkatkan kesejahteraan, diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab dan mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama sehingga kemiskinan dapat ditekan.

Sejarah panjang pembangunan ekonomi Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan sistem perekonomian yang diterapkan oleh setiap rezim penguasa. Ia bisa "*lupa daratan*" pada saat-saat mendapat rezeki nomplok, tetapi bisa berhemat kembali pada masa prihatin. Ini berarti bahwa pasang surutnya perekonomian bangsa Indonesia tidak terlepas dari mental anak negeri yang belum matang dalam menghadapi tantangan dalam berbagai bidang yang pada akhirnya bermuara pada persoalan ekonomi (Mubyarto, 1988). Karena itu, musuh bangsa Indonesia yang paling besar adalah "*tantangan dari dalam diri sendiri*" Sayidiman dalam (Mubyarto, 1988).

Untuk membangun ekonomi yang kuat pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tepat sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki seluruh bangsa. Pembangunan ekonomi meliputi berbagai kebijakan dapat dilaksanakan secara simultan seperti: (1) Kebijakan pertumbuhan; (2) Kebijakan pemulihan ekonomi reformatif atau restrukturisasi ekonomi; (3) Kebijakan lapangan kerja; (4) Kebijakan peningkatan produktivitas; (5) Kebijakan pemerataan dan redistribusi (Pratikno, 2005). Sesungguhnya potensi kita untuk membangun bangsa termasuk perekonomiannya sangatlah besar. Bukan hanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki, tetapi modal yang dibutuhkan untuk pembangunan itu tersedia banyak. Sektor perbankan memiliki likuiditas yang melimpah untuk menopang bergeraknya sektor riil. Dana yang bergerak di pasar modal nilai perdagangannya Rp 3,5 triliun perhari, atau tersedia potensi Rp 1.000 triliun pertahun (Anonomius, 2007).

Pertanyaan mendasar yang patut kita kemukakan disini adalah mengapa potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia tidak mampu menjadi kekuatan yang mengubah status negara kita dari negara berkembang menjadi negara yang maju? Mungkin ada berbagai jawaban yang akan muncul dari pertanyaan ini. Tetapi secara teoritis dapat dikatakan negara kita termasuk negara yang tidak efisien dan tidak produktif. Efisiensi

dalam masyarakat kita tidak hanya menghinggapi bidang ekonomi saja, tetapi merasuk ke segala aspek kemasyarakatan. Efisiensi dan inefisiensi mencakup 3 hal yaitu: (1) Alokasi sumber daya; (2) Perilaku manusia; (3) Sistem kemasyarakatan (Mubyarto, 1988)

Ada pandangan yang mengatakan inefisiensi tidak terjadi pada sektor swasta tetapi justru terjadi di sektor pemerintah atau birokrasi. Karena itu, perlu melakukan reorientasi peran negara termasuk didalamnya pemerintah/birokrasi secara dinamis sejalan dengan tuntutan perubahan yang terus berlangsung di lingkungan internal dan eksternal. Dengan kata lain bagaimana peran negara bisa optimal mendayagunakan segala potensi yang dimiliki bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan (Basri, 2007).

Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia, dimana otonomi daerah sudah menjadi konsensus dan komitmen pemerintah sebagai perwujudan dari demokrasi, maka selayaknya dalam membangun ekonomi perlu keterlibatan semua pihak. Dalam sistem demokrasi, peran dari pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi sama pentingnya. Bahkan tidak hanya itu, ketiga pilar tersebut pada akhirnya harus saling menopang. Sekarang bukan zamannya untuk menumpukkan harapan dan melimpahkan tanggung jawab hanya kepada satu pilar saja (Anonomius, 2007).

Sejak dikeluarkan UU Nomor 22/1999 tentang otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengelola dan memberdayakan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah sesungguhnya memiliki prinsip menjaga keseimbangan dan keadilan antara pemerintah pusat dan daerah Alqadrie dalam (Zulyanto, 2005). Daerah dapat memberdayakan segenap potensi yang dimiliki dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Secara struktural daerah tingkat dua merupakan instansi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, langkah-langkah memberikan hak otonomi nyata dan bertanggung jawab kepada daerah tingkat dua adalah sangat wajar. Masyarakat membutuhkan bimbingan dan pelayanan yang baik bagi pengembangan daya kreativitas, sehingga akan lebih mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bermutu Soenyono (2006).

Sejak masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan kondisi ekonomi belum pulih benar. Pratikno (2005) ada dua hal penting yang perlu dicermati dan dijadikan pelajaran bangsa Indonesia dengan krisis ekonomi tersebut, yaitu: (1) Pembangunan ekonomi yang tidak berbasiskan pada potensi dan kekuatan sendiri (berbasis pada utang dan impor), sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan dapat membawa masyarakat, bangsa dan negara ke dalam krisis yang berkepanjangan; (2) Pendekatan pembangunan yang serba sentralistik, serba seragam dan hanya berpusat pada pemerintah ternyata tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi bangsa yang memiliki fondasi kokoh, bahkan cenderung menghasilkan ekonomi yang didominasi usaha skala besar penuh dengan kepentingan sekelompok kecil orang dengan kinerja yang seolah-olah kuat tetapi sebenarnya sangat keropos.

Pembangunan ekonomi yang hanya bertumpu pada pihak pemerintah pada dasarnya upaya pembangunan yang tidak optimal, dibutuhkan keterlibatan dari seluruh *stakeholders*. Keterlibatan yang dimaksud disini adalah partisipasi nyata yang terbentuk secara berjenjang seperti: (1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan; (3) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil; (4) Partisipasi dalam evaluasi (Kaho, 1987). Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam proses

pembangunan ekonomi merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan UMKM dari keputusan yang dibuat bersama. Model partisipasi dalam pembangunan ekonomi ini dirumuskan dalam satu konsep FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) atau Forum untuk Pengembangan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja (Suprpto dan Van Raaij, 2007). Lembaga ini merupakan wadah yang mempertemukan pemerintah dengan seluruh *stakeholders* yang terkait untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah berperan besar dalam menentukan dan menetapkan kebijakan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan (Suprpto dan Van Raaij, 2007). Seperti lima paket kebijakan ekonomi (Ramli, 2007), diantara kebijakan-kebijakan tersebut adalah Inpres nomor 6 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan sektor ril dan pemberdayaan UMKM (Susanto, 2007). Namun, kebijakan pembangunan untuk mendukung sektor UMKM ini masih belum optimal pada tahap implementasinya (Suprpto dan Van Raaij, 2007). Hal ini disebabkan pola otonomi daerah yang belum dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi implementasi semacam itu di tingkat kabupaten dan kota.

Kekuatan ekonomi Indonesia boleh bertahan ketika dilanda krisis ekonomi pada akhir abad 20 pada dasarnya merupakan kontribusi dari UMKM. Sektor UMKM ibarat jaring pengaman sosial Kasali dalam (Anonomius, 2007). Kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat nyata, karena sektor UMKM lebih fleksibel terhadap perubahan, bahkan dalam keadaan krisis masih dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, persoalan yang sering menjadi kendala dalam mengembangkan sektor UMKM selain kualitas SDM adalah faktor modal (Mundung *et al.*, 2001). Melalui investasi dapat memberikan kontribusi bagi terbukanya lapangan pekerjaan maupun bisnis baru. Juga dengan adanya investasi membuka peluang terjadinya kemitraan dan pengembangan UKM dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan mapan (Anonomius, 2007). dibanding dengan negara ASEAN, baik kinerja makro dan mikro, Indonesia berada pada ekstrim bawah, sehingga tidak kompetitif menarik investasi dari luar negeri. Untuk itu sangat dibutuhkan tumbuhnya wirausaha baru. Mengingat lebih dari 97 % unit usaha yang ada di Indonesia adalah usaha mikro, Adiningsih dalam (Soetrisno, 2003). Ke depan untuk menghadapi persoalan mendesak dalam menumbuhkan usaha baru untuk bersaing dalam pasaran global adalah pembentukan kerangka kondisi dan lingkungan usaha yang baik bagi tumbuhnya wirausaha baru, sistem insentif yang dirancang dengan baik, intervensi pemerintah yang seminimal mungkin tetapi efektif, kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi, membangun perusahaan swasta untuk mengembangkan dan mengasuh wirausaha baru.

Maju mundurnya ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan sejauh mana iklim usaha yang tercipta di daerah tersebut. Pemerintah daerah sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan termasuk kebijakan dibidang ekonomi sebagai faktor kunci terwujudnya kemajuan ekonomi lokal. Karena itu ruang lingkup kajian Pengembangan Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Lokal meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan apa saja yang berkaitan dengan perekonomian dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Minahasa Selatan; (2) Sejauh mana gambaran kontribusi usaha kecil bagi pertumbuhan ekonomi sejak otonomi daerah diberlakukan di Kabupaten Minahasa Selatan; (3) Sejauh mana bantuan bagi pengembangan usaha kecil di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan tujuan yang ingin

dicapai adalah: (1) Untuk mengetahui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aktifitas usaha kecil di Kabupaten Minahasa Selatan; (2) Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi usaha kecil bagi pertumbuhan ekonomi sejak otonomi daerah dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan; (3) Untuk mengetahui bantuan bagi pengembangan usaha kecil di Kabupaten Minahasa Selatan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik survei, dengan berupaya melakukan pengumpulan data seperti apa adanya, tanpa adanya perlakuan khusus terhadap obyek penelitian melalui instrumen yang telah disediakan. Setelah data terkumpul akan dianalisis, dideskripsikan dan diinterpretasi supaya dapat memberikan gambaran yang faktual mengenai obyek dan subyek penelitian. Populasi dari survei ini adalah seluruh pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di kabupaten Minahasa Selatan sebagai daerah amatan dalam penelitian ini. Juga termasuk didalamnya adalah beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan pengembangan UMKM di kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi lokasi penelitian.

Sampel ditentukan sebanyak 15 sampai 30 unit usaha kecil dan menengah yang diambil dari enam kecamatan, dengan jumlah desa sampel ditentukan secara proposional. Sedangkan instansi yang di survei adalah instansi yang memiliki keterkaitan erat dengan pembinaan serta pengembangan usaha kecil dan menengah bagi pertumbuhan ekonomi. Data yang diperoleh dari pelaku usaha adalah data primer sedangkan dari instansi pemerintah umumnya berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis menggunakan model analisis statistik nonparametrik karena sesuai dengan jenis data yang akan dikumpulkan berada pada kategori skala nominal dan skala ordinal.

HASIL

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui responden yang karakteristiknya seperti yang diuraikan berikut ini. Umur responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berada pada kisaran 30 tahun sampai dengan 60 tahun. Umur responden ini dibagi tiga kategori yaitu 30 sampai dengan 40 tahun (4%), 41 sampai dengan 50 tahun (38%), dan 51 sampai dengan 60 tahun (18%). Sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin menunjukkan mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil terdiri dari laki-laki (94%), sedangkan perempuan relatif sedikit jumlahnya yakni (6%). Tingkat pendidikan responden berada pada kategori yang cukup memadai karena tidak ada lagi yang berpendidikan sekolah dasar. Sebagaimana nampak pada gambar 4 dibawah ini dimana yang terbanyak berpendidikan SLTA 62 %, yang terendah SLTP dengan jumlah 6 %. Sedangkan yang berpendidikan tinggi sebanyak 25 %.

Jenis usaha yang dipilih oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi responden dalam penelitian ini yang terbanyak adalah pedagang (69%), diikuti oleh pelaku industri kecil (19%) dan yang paling sedikit yang memilih usaha jasa (12%). Lama berusaha pada bidang kerja yang dijalani responden cukup bervariasi antara 1 sampai lebih dari sepuluh tahun. Jangka waktu berusaha dapat dikategorikan pada jangka pendek (64%), jangka menengah (18%) dan jangka panjang (18%). Modal usaha yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan bisnis hanya ada dua sumber yaitu miliki

sendiri (75%) dan pinjaman dari pihak ketiga (25%) bukan dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usaha lebih dari 80 % pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa usaha yang mereka lakukan dapat diperluas. Indikasi ini memberikan keyakinan bahwa prospek usaha yang dilakukan cukup baik sehingga pelaku usaha berani mengambil resiko untuk memperluas usaha di masa yang akan datang.

Aspek positif dari kegiatan usaha adalah kemampuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dengan membuka usaha akan memberikan kesempatan dalam menyerap tenaga kerja. Menurut responden (25%) menyatakan daya serap tenaga kerja cukup besar dan (37,5%) masing-masing sedang sampai kurang. Dalam memasarkan produk masih bertumpu pada pemasaran lokal (69%) dan sebagian lagi (31%) antar daerah dalam lingkup kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena bentuk usaha pada umumnya di bidang perdagangan sehingga lebih banyak berfungsi menyalurkan barang pada tingkat konsumen akhir. Sedangkan fungsi produksi relatif kurang besar karena bentuk usaha manufaktur sangat kurang kuantitasnya. Persaingan merupakan hakekat dari bisnis. Karena itu setiap bentuk usaha pasti akan menghadapi kompetitor. Pada tingkat aktifitas ekonomi lokal di Kabupaten Minahasa Selatan tingkat persaingan bisnis berada pada level sedang dan ketat (25%). Di mana setengah responden menilai persaingan yang mereka rasakan berada pada tingkatan sedang (50%). Kemudian yang merasa tingkat persaingan ketat dan kurang ketat masing-masing (25%) dari jumlah responden. Setiap pelaku usaha mengharapkan dalam melakukan aktifitas bisnis dapat berlangsung dalam suasana yang aman tanpa gangguan dari pihak-pihak yang ingin merusak suasana usaha yang kondusif. Jika keamanan tidak terjamin akan memberikan resiko usaha yang tinggi bagi pelaku usaha. Dari hasil survei yang kami lakukan (44%) responden merasa sangat aman dan (56%) menyatakan cukup aman. Dilihat dari aspek budaya masyarakat Minahasa Selatan dan Sulawesi Utara pada umumnya dengan berbagai suku dan sub etnisnya, ternyata aspek sosial budaya tidak mengganggu praktek bisnis. Hal ini mengindikasikan peluang usaha di daerah ini sangat terbuka tanpa ada hambatan sosial dan budaya. Artinya masyarakat sangat menerima aktifitas usaha dapat dijalankan karena tidak ada halangan dari sisi nilai-nilai dan perilaku kehidupan sehari-hari dari masyarakat.

Informasi menjadi hal yang sangat penting di era bisnis global. Karena itu pelaku usaha yang tidak memiliki sumber dan jaringan informasi relatif sulit untuk mendapatkan nilai tambah yang memadai dari hasil usahanya. Sebanyak (75%) responden menyatakan ada jaringan informasi untuk mengakses bisnis, dan hanya (13%) yang menyatakan tidak ada namun (6%) menyatakan tidak tahu. Hanya saja apakah informasi yang tersedia sudah mampu dimanfaatkan secara optimal. Barangkali hal ini perlu terus diteliti karena penulis masih meragukan pemanfaatan informasi untuk mendorong terciptanya usaha yang berkesinambungan. Pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai institusi, sehingga peluang menerima informasi yang berkaitan dengan bisnis terbuka dengan lebar. Hanya saja lebih dari 50 % pelaku usaha belum pernah mengikuti pelatihan. Hal ini cukup ironis karena begitu banyak kesempatan memperkaya pengetahuan melalui keikutsertaan dalam pelatihan.

Modal usaha sering menjadi isu krusial bagi pelaku usaha dalam mendapatkannya. Sering kali bantuan modal dari pemerintah hanya mengalir pada pelaku usaha tertentu yang sudah memiliki kedekatan dengan oknum-oknum yang mempunyai otoritas dalam menyalurkan bantuan. Di samping itu biasanya dana yang dijanjikan

untuk bantuan tidak sepenuhnya utuh sampai ke tangan yang menerima bantuan. Baru (25%) responden yang sudah pernah menerima bantuan modal dari pemerintah, sedangkan sebanyak (75%) belum pernah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.

Dari hasil observasi peneliti menemukan umumnya peraturan daerah dibidang ekonomi hanya dimaksudkan untuk mengumpulkan pundi-pundi pendapatan asli daerah. Sehingga lebih dari 50 % responden berpendapat bahwa mereka memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah antara sedang sampai besar. Namun demikian semua pelaku usaha merasa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Secara terperinci dapat dikategorikan (6%) besar, (50%) sedang dan (44%) rendah.

Keberlanjutan perekonomian lokal akan sangat ditentukan sejauh mana kualitas lingkungan saat ini. Sebab melihat karakteristik perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan yang masih bertumpuh pada sumber daya alam, cukup krusial jika lingkungan sudah tidak mendukung keberlanjutan perekonomian di masa yang akan datang akibat kondisi alam yang telah rusak. Pelaku usaha memberikan respon bahwa aktifitas usaha yang mereka lakukan tidak mengganggu lingkungan. Tetapi, perlu pemikiran dan sikap skeptis terhadap pendapat ini. Biasanya orang tidak akan berkata jujur jika belum atau tidak terdapat bukti tentang perilaku usaha yang merusak lingkungan. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan pengawasan yang berkelanjutan agar daya dukung lingkungan dapat dilestarikan demi keberlanjutan ekonomi lokal itu sendiri.

Pembahasan

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang ekonomi yang menjadi titik sentral kajian ini ingin menyoroti bagaimana pengembangan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan program yang berkaitan dengan ekonomi lokal. Sebagaimana uraian yang telah diungkapkan dibagian terdahulu tulisan ini bahwa ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan memiliki karakteristik yang masih bertumpu pada hasil sumber daya alam seperti pertanian, perikanan dan pemanfaatan sumber-sumber mineral yang terkandung di perut bumi. Hal ini terlihat dari struktur tenaga kerja yang menunjukkan lebih dari 50 % bekerja pada sektor yang berbasis sumber daya alam seperti pertanian, hasil laut, pertambangan dan jenis pekerjaan yang menghasilkan produk yang berbahan baku hasil bumi. Memang, sejak sepuluh tahun terakhir pertumbuhan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan, sebaliknya sektor jasa mengalami peningkatan. Penurunan dan peningkatan masing-masing sektor tidak terlalu signifikan karena hanya berada pada kisaran rata-rata 2-3%. Hal ini jika diamati lebih seksama akan nampak bahwa terdapat potensi tenaga kerja yang masuk pada kategori penganggur tidak kentara,

karena pekerjaan yang dilakukan kurang jelas. Pekerjaan yang bersifat informal menjadi fenomena yang nampak hidup ditengah-tengah masyarakat, dan inilah yang menjadi tantangan di era otonomi bagi pemerintah daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan secara umum bertumpu pada tiga sektor yaitu: (1) Pertanian; (2) Manufaktur (pertambangan, industri, listrik, air dan konstruksi); (3) Jasa (perdagangan, restoran, angkutan, keuangan, jasa pemerintahan dan jasa-jasa lainnya). Sejak sepuluh tahun terakhir nilai tambah dari sektor-sektor tersebut di atas terdistribusi seperti berikut agrikultur sebesar 50 %, manufaktur kurang lebih 20 %, dan jasa kira-kira 30 %. Jika dibandingkan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian dengan pekerja di sektor jasa nampaknya kontribusi pada ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan sepertinya bertolak belakang. Hal ini terjadi karena produk sektor pertanian nilai tambahnya relatif kecil disebabkan posisi tawar menawar petani umumnya relatif lemah. Sering kali harga produk pertanian ditentukan oleh konsumen bukan produsen. Sedangkan sektor jasa nilai tambahnya relatif besar karena produsen ketika menentukan harga selalu melakukan kalkulasi yang didasarkan dengan perhitungan *cost and benefit* yang sangat memperhatikan biaya produksi dan tingkat profit yang ingin dicapai berdasarkan harga yang kompetitif di pasar. Untuk sektor industri kontribusi pada sektor ekonomi berada posisi menengah antara pertanian dan jasa. Industri yang bertumpu pada bahan baku dari sumber daya alam berupa hasil pertanian dan hasil perikanan serta sebagian hasil pertambangan cukup memperkuat struktur ekonomi daerah. Namun, secara umum dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan sektor-sektor dibidang ekonomi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahkan kontribusi pada struktur ekonomi terus terjadi dengan tingkat fluktuasi berada pada kisaran plus minus 3 % selang 10 tahun terakhir.

Struktur ekonomi dipengaruhi juga sejauh mana tingkat investasi yang terjadi di suatu daerah. Laporan BPS Sulut 2006 menunjukkan tingkat investasi tertinggi selang sepuluh tahun terakhir terjadi sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997 yakni pada tahun 1996 sebesar 31,07%. Sejak otonomi daerah diterapkan pada tahun 2001 prosentase pertumbuhan investasi berada pada tingkatan 16%, dan hanya pada tahun 2006 prosentasenya meningkat menjadi 18,76% dengan nilai investasi sebesar 4,03 triliun. Nilai investasi ini masih bersifat umum dan belum menggambarkan sektor-sektor apa saja yang menjadi obyek investasi. Disamping itu pelaku investasi belum tergambar dengan jelas apakah dari sektor publik atau swasta. Data inipun masih bersifat makro sehingga relatif sulit untuk melihat sektor-sektor apa yang menjadi target investasi yang dapat dikategorikan pada sektor produktif atau sebaliknya pada sektor yang lebih mengarahkan masyarakat pada pola konsumtif. Namun, yang pasti melalui investasi akan terjadi pergerakan ekonomi walaupun mungkin dalam skala yang relatif kecil.

Perbandingan ekspor dan impor pada 10 tahun terakhir pada umumnya menunjukkan tingkat ekspor lebih besar dari pada impor. Tingkat ekspor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Namun laju ekspor bertumbuh sebanding dengan laju pertumbuhan impor. Sebagai contoh pertumbuhan ekspor pada tahun 2005 sebesar 6,54 triliun, dan tahun 2006 sebesar 7,44 triliun, sedangkan impor bertumbuh dari 4,47 triliun menjadi 5,89 triliun. Kenaikan ekspor sebesar 0,90 triliun dan kenaikan impor sebanyak 1,42 triliun. Kondisi ini cukup krusial karena secara absolut pertumbuhan impor lebih besar dari pada pertumbuhan

ekspor. Jika kecenderungan pola ekspor impor ini terus berlangsung akan sangat krusial bagi sektor ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan bahkan bagi provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat mengindikasikan mesin ekonomi daerah ini kurang berjalan sehat, artinya sektor-sektor produktif yang menunjang terjadinya ekspor tidak berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat daerah ini masih sangat tergantung dari luar daerah. Solusinya, harus terus ditingkatkan kemampuan produktifitas semua sektor yang menunjang ekonomi agar tidak tergantung pada daerah lain atau negara lain.

Tingkat konsumsi masyarakat Sulawesi Utara di mana termasuk didalamnya Kabupaten Minahasa Selatan selang sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Data konsumsi yang dikeluarkan BPS Sulut menunjukkan sejak tahun 1995 konsumsi rumah tangga sebesar 1,7 triliun dan terus saja mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2006 sudah berada pada kisaran 9,83 triliun. Jika dibandingkan dengan ekspor nampaknya nilai konsumsi lebih tinggi seperti ditunjukkan oleh data pada tahun 2006 di mana nilai ekspor sebesar 7,44 triliun sedangkan jumlah konsumsi rumah tangga lebih besar 2,39 triliun. Jika ditambah dengan konsumsi pemerintah maka tingkat konsumsi total sebesar 14,98 pada tahun 2006. Dilihat dari sisi ekonomi kondisi seperti ini mengindikasikan ada mekanisme yang kurang baik dalam proses perekonomian. Idealnya nilai ekspor lebih besar dari tingkat konsumsi sehingga ada surplus pendapatan untuk ditabung sebagai modal untuk investasi dan untuk berbagai aktifitas yang produktifitas. Hanya saja jika melihat PDRB propinsi Sulawesi Utara didalamnya masuk Kabupaten Minahasa Selatan yang sebesar 21,50 triliun pada tahun 2006 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat produktifitas secara keseluruhan masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Karena itu secara makro, ekonomi Minahasa Selatan sebagai bagian dari propinsi Sulawesi Utara cukup aman walaupun dilihat dari sisi likwiditas relatif kurang sehat karena tidak mencapai perbandingan 2 : 1.

Pertumbuhan ekonomi sejak awal reformasi dimulai sampai dengan tahun 2006 belum mampu melewati pertumbuhan sebelum terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Tingkat pertumbuhan tertinggi pada sepuluh tahun terakhir menurut BPS Sulut 2006 terjadi pada tahun 1996 yakni sebesar 9,01%. Sesudah otonomi daerah digulirkan pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik pada kisaran 2,13 % menjadi 6,16 % pada tahun 2006. Secara perlahan-lahan dari tahun ke tahun peningkatan pertumbuhan ekonomi terus terjadi seiring dengan semakin kondusifnya situasi politik dan keamanan dalam negeri, disamping itu fondasi ekonomi nasional mulai mantap dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berupaya untuk memulihkan roda perekonomian pada trak yang benar sesuai dengan kondisi makro ekonomi.

Aspek ekonomi makro nasional memberikan pengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi daerah. Hanya saja di era desentralisasi seperti yang ada sekarang peran pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi cukup besar melalui kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Dan, pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan yang sesuai dengan karakteristik potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Kebijakan umum yang dituangkan pemerintah melalui rencana strategis yang menitik beratkan pada sektor-sektor pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan sumber daya utama yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Sejak era pemerintahan orde baru sampai era reformasi seperti saat ini, sektor-sektor ekonomi ini menjadi titik sentral pengembangan ekonomi lokal. Revitalisasi pertanian yang menjadi andalan untuk menggerakkan ekonomi rakyat

dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur merupakan bentuk terobosan dari kebuntuan sistem pengelolaan pertanian masyarakat yang selama ini lebih mengandalkan pada tanaman keras seperti cengkih dan kelapa.

Data yang dilansir Bank Indonesia yang dikutip Arifin (2007) menunjukkan luas lahan jagung pada tahun 2007 tumbuh 45% menjadi 128 ha dengan produksi pililan jagung kering tercatat 398 ribu ton (tumbuh 64% dibanding tahun 2006). Disamping itu, harga jagung di pasar internasional melonjak dengan tajam karena tingkat konsumsi yang tinggi dan penggunaan bahan jagung untuk biofuel. Diprediksi di masa yang akan datang harga jagung akan tetap tinggi sehingga memberikan peluang keuntungan bagi produsen. Hanya saja pada tingkat implementasi persoalan-persoalan klasik seperti inkonsistensi dalam mewujudkan produk yang direncanakan menjadi kendala yang cukup nyata di tingkat petani. Sering banyak orang terjebak pada ketergantungan bantuan pemerintah terutama dalam bentuk subsidi modal awal untuk memulai usaha. Di samping itu jika ada petani yang sudah berhasil membudidayakan tanaman terkendala dengan pemasaran hasil produksi. Padahal permintaan konsumen terhadap produk jagung sangat besar untuk pasar global, bahkan untuk pasar nasional yang diperuntukkan untuk pakan ternak permintaan jagung masih belum memenuhi kouta. Persoalan ini menjadi sangat dilematis karena petani kesulitan memasarkan produk disatu sisi, sedangkan disisi lain permintaan untuk memenuhi stok dalam negeri saja masih mengalami defisit. Yang sangat diperlukan adalah bagaimana mencari akses pasar supaya terjadi interaksi langsung antara produsen dan konsumen jagung. Hal ini sangat tergantung bagaimana mencari informasi pasar dengan membangun jaringan kerja yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dengan produsen.

Sektor perikanan menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menjadi penggerak ekonomi lokal karena langsung bersentuhan dengan nelayan yang sehari-hari terjun langsung dengan aktifitas penangkapan ikan di laut. Kendala yang sering menjadi sumber ketidakmampuan nelayan meningkatkan produktifitas penangkapan ikan terletak pada sarana penangkapan ikan yang kurang memadai dibandingkan dengan sarana yang digunakan oleh nelayan-nelayan asing. Persoalan lain adalah ketika tangkapan nelayan cukup banyak pasar lokal khususnya di daerah yang akses transportasinya belum memadai, justru menyebabkan hasil produksi tidak terjual. Sehingga banyak nelayan yang kurang bergairah dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan berorientasi meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi lebih sering berpola pikir untuk memenuhi tingkat konsumsi keluarga. Persoalan ini juga merupakan persoalan klasik yang sudah terjadi sejak lama dikalangan nelayan pada umumnya sehingga tingkat perkembangan ekonomi mereka tidak pernah membaik dari tahun ketahun.

Di tingkat pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan yang mengelola bidang perikanan dalam rangka memajukan orang-orang yang beraktifitas di sektor perikanan yaitu nelayan dan yang membudidayakan ikan. Berbagai program telah diluncurkan untuk menunjang terciptanya pelaku usaha di sektor perikanan yang kuat dan mandiri melalui bantuan permodalan, tehnologi dan manajemen usaha. Namun tingkat keberhasilannya relatif belum memadai karena belum dapat menyentuh lapisan terbesar dari nelayan terutama yang berada pada daerah-daerah potensial penghasil ikan.

Peluang usaha yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan dapat diperoleh dari sektor pariwisata. Potensi sektor pariwisata ini memiliki nilai jual yang tidak kalah dengan daerah lain. Berbagai obyek wisata alam

dapat menjadi daya tarik yang cukup besar bagi orang-orang yang senang berwisata. Secara global industri pariwisata merupakan bisnis yang memiliki potensi besar. Ratusan juta orang setiap tahun melakukan perjalanan wisata mengelilingi bagian dunia yang memiliki daya tarik dan berbagai macam pesona. Wisata alam menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi sebagian besar pelancong yang mencari sensasi dengan eksotis daerah tropis.

Melihat data yang dikeluarkan BPS Sulut tentang jumlah wisata baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, maka sejak krisis moneter pada tahun 1997 pertumbuhannya tidak terlalu pesat. Padahal dilihat dari resiko terjadinya kekacauan dan konflik, daerah ini sangat kondusif karena nyaris tidak ada gangguan berarti dilihat dari sisi kondisi sosial dan keamanan. Mungkin saja kendala-kendala seperti aksesibilitas ke dan dari lokasi wisata kurang lancar. Dari segi atraksi yang merupakan daya pikat bagi wisatawan mungkin tidak dikemas dengan menarik. Juga layanan yang diberikan pengelola jasa wisata belum sebaik daerah atau negara lain, dan mungkin faktor-faktor pendukung lain belum memenuhi harapan wisatawan. Di sisi lain potensi wisata yang dimiliki daerah ini mungkin belum mampu dikemas dan dipasarkan secara profesional. Karena itu perlu terus-menerus mengadakan pembenahan pada berbagai fasilitas wisata maupun layanan yang diberikan pelaku usaha pariwisata kepada wisatawan. Di samping itu mental sumber daya manusia yang bergerak pada sektor pariwisata perlu terus-menerus di asah agar sebagai orang yang bekerja pada sektor jasa layanan kepariwisataan dapat terus memberikan dan meningkatkan kualitas layanan menuju pada layanan prima.

Untuk mewujudkan kebijakan pemerintah diawali dengan pembuatan berbagai regulasi yang berkaitan dengan berbagai obyek yang akan diatur. Di era pemerintahan yang tersentralisasi berbagai kebijakan senantiasa diatur dari pusat. Tetapi di era otonomi seperti saat ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah. Nampaknya, pada umumnya aturan yang berkaitan dengan berbagai aktifitas perekonomian masyarakat lebih banyak memuat tentang regulasi yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan regulasi yang berkaitan dengan upaya memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti misalnya kemudahan berinvestasi belum banyak diakomodir. Biasanya pelaku usaha yang akan berinvestasi mengharapkan semua hal yang berkaitan dengan proses penanaman modal dapat berlangsung dengan cepat, aman dan murah. Karena pada dasarnya biaya ekonomi yang tinggi akan berdampak pada harga jual dari produk yang akan dihasilkan. Harga yang tinggi akan berdampak pada ketidak mampuan bersaing dengan produk yang sejenis di pasar, sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan pelaku usaha. Dengan demikian, dapat dikatakan kebijakan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi lokal sudah ada tapi belum optimal sebagaimana harapan dari pelaku usaha.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas sesungguhnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Minahasa Selatan cukup besar baik dilihat dari aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai pengelolanya. Karena itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mampu memberikan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan kekuatan ekonomi lokal secara berkelanjutan perlu sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Ini berarti pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam menentukan berbagai kebijakan layanan kepada masyarakat perlu melibatkan seluruh

komponen yang ada didalam masyarakat untuk merumuskan konsep-konsep yang akan menentukan arah kebijakan itu sendiri.

Khusus dibidang perekonomian pemerintah harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan arah kebijakan yang akan dikeluarkan. Pemerintah sebagai pemiliki otoritas kekuasaan di daerah harus melakukan proses dialog dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penggodok berbagai peraturan daerah. Juga dengan Lembaga Swadaya masyarakat sebagai organisasi yang relatif independen menilai hasil kerja dan kebijakan pemerintah. Selain itu pelaku bisnis yang memahami benar lika-liku mekanisme pasar yang terjadi dalam aktifitas usaha yang mereka lakukan. Minimal keempat pihak ini yakni pemerintah, DPRD, LSM dan pelaku usaha dapat berkolaborasi dalam kedudukan yang setara lewat partisipasi aktif untuk melahirkan kebijakan yang berkualitas dalam rangka memberdayakan setiap potensi ekonomi lokal kearah yang lebih baik dan berdasarkan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, akan terjadi sinergitas kekuatan agar mampu untuk memberdayakan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Disamping itu, keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan rasa tanggung jawab bagi mereka untuk menjalankan dan mengamankan setiap keputusan yang dihasilkan.

Pada dasarnya keberlanjutan ekonomi global akan diawali dari sejauh mana ekonomi lokal dapat diberdayakan secara berkelanjutan, di mana unsur-unsur pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh segitiga pembangunan yaitu Masyarakat, Ekonomi dan Lingkungan (Suprpto dan Van Raaij, 2007). Masyarakat sebagai titik sentral dari segitiga pembangan yaitu pertumbuhan ekonomi akan terwujud jika mereka memiliki kapasitas dalam melakukan aktifitas usaha. Ekonomi akan terjaga keberlanjutannya jika masyarakat mampu menjaga lingkungan sebagai sumber daya utama ketersediaan bahan baku untuk proses produksi. Intinya aktifitas ekonomi dan kelestarian lingkungan akan dapat terwujud dari, oleh dan untuk masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi lokal akan terpulang pada masyarakat itu sendiri dengan kebijakan pemerintah yang mampu memberdayakan potensi daerah.

Pemerintah daerah sebagai otoritas birokrasi yang menjadi tumpuan masyarakat dalam pengaturan berbagai regulasi harus mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Khususnya dalam bidang perekonomian implementasinya dapat diwujudkan dalam bentuk pembaruan birokrasi perizinan usaha dan pelayanan umum. Contoh praktis dalam bentuk sistem pelayanan terpadu atau one stop service bagi setiap masyarakat yang membutuhkan layanan dari pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Jaweng dalam Anonomius (2007) daerah-daerah yang telah menjalankan program ini di Indonesia antara lain Sragen (Jateng), Cimahi (Jabar), Banjarbaru (Kalsel), Jembrana (Bali), Pare-Pare (Sulsel) masyarakat dan para pelaku usaha hari-hari ini menikmati hasil pelayanan prima yang diberikan pemerintahnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan didalam kajian ini dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini: (1) Karena kabupaten Minahasa Selatan merupakan daerah otonomi yang relatif baru dimekarkan, sehingga belum ada peraturan dan regulasi dibidang ekonomi yang dihasilkan daerah ini. Peraturan yang digunakan masih didasarkan atas

peraturan produk daerah induk. Menyangkut kebijakan dibidang ekonomi khususnya usaha kecil kecenderungannya masih melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang lebih tinggi; (2) Pelaku usaha kecil di kabupaten Minahasa Selatan cukup memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka; (3) Secara umum realisasi bantuan pemerintah bagi pengembangan usaha kecil dan koperasi di Minahasa Selatan masih relatif kecil. Sesuai dengan data dari insansi terkait periode tahun 2000 sampai dengan 2006 hanya sebesar Rp 4.1000.000.000; (4) Untuk menarik investor untuk melakukan investasi di daerah ini perlu ada kemudahan melalui *one stop service* sehingga tingkat efisiensi dan efektifitas layanan dapat dilakukan secara optimal; (5) Walaupun sumber daya alam di kabupaten Minahasa Selatan cukup potensial sebagai modal dasar penggerak ekonomi, namun apabila tidak mampu dikelola dengan bijaksana oleh sumber daya manusia yang berkualitas maka akan menjadi penghambat bagi penggerak ekonomi lokal.

Saran

Adapun beberapa hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Peraturan dan regulasi yang dihasilkan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan hendaknya lebih mengutamakan upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang produktif; (2) Reformasi birokrasi untuk layanan publik hendaknya dapat diwujudkan dengan memberikan layanan prima bagi setiap masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah; (3) Kemudahan untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktifitas; (4) Akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat untuk digunakan dalam menunjang pengambilan keputusan bisnis; (5) Hendaknya pemerintah terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana transportasi di seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar supaya akses masyarakat dan pelaku usaha untuk memasarkan produk dapat dilakukan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonomius. 2007. *Bersama Membangun Ekonomi*. Tajuk Rencana, Kompas 2 Mei 2007, Jakarta.
- Anonomius. 2007. *Usaha Kecil dan Menengah*. Inspiratorial, Kompas 17 Juli 2007, Jakarta.
- Anonomius. 2007. *Membangun Sinergi antara Si Besar dan Si Kecil*. Inspiratorial, Kompas 17 Juli 2007, Jakarta.
- Basri, F. 2007. *Reformasi Birokrasi*. Kompas edisi Juli 2007, Jakarta.
- Kaho, R. J. 1987. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kristamuljana, S. 2007. *Pesaing Kelas Atas*. Kompas edisi Mei 2007, Jakarta.

- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Mundung, M. 2001. *Efektifitas Pembangunan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Sulawesi Utara*. Fisip Unsrat, Manado
- Pratikno, H. 2005. Analisis Potensi dan Kebutuhan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Tahun 10, Nomor 2, Hal. 505-524. Malang.
- Soenyono. 2006. Prospek Ekonomi Daerah pada Era Globalisasi dan Reformasi: Beberapa Pemikiran. *Eksekutif Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 3, Nomor 3, Hal. 327-337. Surabaya.
- Suprpto dan Van Raaij, R. 2007. *Ekonomi Partisipasi*. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Jakarta.
- Susanto, H. 2007. *Pertumbuhan Vs Pemerataan*. Kompas edisi 16 Juni 2007, Jakarta.
- Ramli, R. 2007. *Paket Kebijakan Ekonomi, Nyaring Bunyinya*, Kompas edisi 16 Juni 2007, Jakarta.
- Zulyanto, D. 2005. Peranan Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Transmigran: Studi Kasus Konsep Equal Right di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Tahun 10, Nomor 2, Hal. 487-504. Malang.
- , 2006. *Perspektif dan Kompetensi Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Sinergitas Pembangunan Bangsa*. Edisi Ketiga, Pemda Kabupaten Minahasa Selatan, Amurang.